

Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Otonomi

Alfi Sahrin¹, Yasser Arafat^{2*}, Arnasari Merdekawati Hadi³

¹Poloteknik Medica Farma Husada Mataram, Mataram, Indonesia

^{2,3}STKIP Bima, Bima, Indonesia

*Corresponding Author: yasserarafat003@gmail.com

Article history

Dikirim:
10-08-2022

Direvisi:
12-08-2022

Diterima:
13-08-2022

Key words:

Peran perguruan tinggi;
Daya Saing daerah

Abstrak: Perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi harus dilakukan secara terencana, terukur dan sistematis dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah agar pendidikan tinggi kedepan bisa memenuhi harapan masyarakat, sehingga pendidikan tinggi mampu mencetak alumni siap pakai dan berperan sebagai *problem solver* yang disertai dengan kompetensi terlatih dan mempunyai moralitas tinggi supaya dapat bekerja dengan disiplin tinggi, loyal, jujur, berdedikasi, bekerja keras, berjiwa sosial, adil, dan bertanggung jawab pada pekerjaan serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing daerah akan semakin terbuka dan saling menguntungkan apabila perguruan tinggi dan pemerintah daerah saling membuka diri membangun kerjasama di banyak hal dalam rangka membantu menyelesaikan persoalan strategis yang hari ini masih menjadi atensi publik misalnya pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi topik utama pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara seksama tentang peran perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing daerah di era otonomi melalui kemitraan strategis dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Akselarasi pembangunan disegala bidang dapat dipacu dan dicapai dengan menjalin kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dengan program unggulan pemerintah daerah karena kampus memiliki SDM memadai yang didukung oleh keterandalan pengalaman masing-masing dosen. Penelitian ini adalah *library reseach* yaitu melakukan studi literatur berupa buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang peran perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing dan percepatan pembangunan daerah di era otonomi. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu melalui studi literatur, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu menyajikan data-data faktual dikemudian dinarasika secara deskriptif.

PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif dan selektif akibat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tentunya ini memberikan *alarm warning* kepada dunia pendidikan tinggi dan pemerintah daerah untuk lebih berpacu dalam bersaing meningkatkan kompetensi pengetahuan, *life skill* dan *soft skill* agar mampu bertahan di tengah desakan kompetisi yang mensyaratkan

kompetensi. Tantangan ke depan akan semakin besar dan terbuka yang dihadapi akibat kebijakan trans nasional seperti perjanjian kerjasama unilateral, bilateral, multilateral dalam berbagai bentuk kerjasama dan semua itu tidak bisa dihindari karena hidup seperti di tengah kampung global kata Antony Giddens, karena dunia tidak ada lagi batas-batas wilayahnya.

Menarik uraian tulisan yang sama dari Raymond L Karl Popper dalam bukunya yang berjudul "*Masyarakat Terbuka*", di mana ia menjelaskan kondisi makro negara yang sangat luas bentangan wilayahnya, baik darat, udara, dan laut yang tidak mungkin bisa dijelajah dan di jangkau satu persatu karena pasti membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan pikiran. Dan itu mustahil bisa dilakukan dalam waktu sangat pendek karena mengelilingi 191 desa yang ada di Kabupten Bima sulit kita lakukan apalagi mengelilingi negara yang besar dan luas di dunia ini, tetapi kata Raymond L Karl Popper karena kemajuan ipteks di bidang IT manusia dapat berinteraksi dan berkunjung di banyak negara dalam waktu hitungan detik dan menit melalui *googling* untuk *searching* informasi, sekarang pilihannya cuman satu?.Apakah mau maju berlomba-lomba untuk bangkit berkarya meraih prestasi atau mundur dalam mengejar ketertinggalan tetapi tergilas oleh ganasnya kemajuan yang dicapai oleh bangsa lain.

Indonesia hari ini dihadapkan pada situasi yang tidak menentu seperti jumlah pengangguran semakin meningkat, lapangan kerja yang sempit dan terbatas, laju pertumbuhan penduduk yang cepat bertambah, kesenjangan kehidupan sosial antara yang kaya dan miskin semakin menganga, pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sampai diangka 6 persen, mutu pendidikan yang tidak merata ditiap daerah, korupsi semakin merajalela, potensi konflik semakin terbuka, kriminalitas tumbuh subur, narkoba semakin bebas beredar, moralitas generasi semakin rusak akibat gaya hidup bebas, dan ancaman disintegrasi sedang digoyang, serta yang sangat mengkhawatirkan hari ini adalah kondisi ekonomi nasional terancam ambruk jika rupiah terjun bebas dan situasi sosial akan kembali terancam konflik jika ekonomi kembali mengalami krisis.

Di tengah banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara seperti dikemukakan di atas, maka peran penting dan strategis dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka mengurai persoalan yang dihadapi, karena perguruan tinggi memiliki ketersediaan sumber daya manusia memadai seperti sumber daya manusia yang unggul, memiliki lembaga riset yang kredibel serta sarana prasarana pendukung yang cukup menunjang keberlangsungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut membantu menyuksekan pembangunan di daerah. Di era otonomi, pemerintah daerah diberi kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab untuk mengelola daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Christia & Ispriyarso, 2019).

Pemerintah daerah dalam rangka memajukan dan meningkatkan daya saing daerah harus adaptif dan terbuka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan dunia luar, sehingga pemerintah daerah diberikan kesempatan berkolaborasi dengan dunia perguruan tinggi untuk menjalin kemitraan melakukan berbagai riset yang berkontribusi bagi kemajuan daerah (Sari & Retnaningsih, 2020; Sihite & Saleh, 2019). Pemerintah pusat dalam rangka mempercepat kemajuan



pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu memperkuat kewenangan, fungsi, dan peran pemerintah daerah, dan itu dapat terlihat dari beberapa kali perubahan undang-undang yang mengatur kewenangan tentang pengelolaan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Begitupun juga dengan dunia pendidikan tinggi pengaturan tentang kewenangan, fungsi dan peran diperkuat melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2012.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Perguruan Tinggi Berbasis *Scientific Vision*

Pengelolaan manajemen perguruan tinggi telah mengalami perubahan cukup signifikan dari tahun ke tahun dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*need social*), kebutuhan jasa pengguna (*need stake holders*). Perubahan pengelolaan perguruan tinggi dimaksudkan semata-mata agar perguruan tinggi mampu bersaing dengan banyak kemajuan dan beradaptasi dengan ide-ide kebaruan perkembangan dunia luar yang serba cepat berubah dan berkembang tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah banyak memberi perubahan bagi kehidupan sosial baik di bidang pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan. Sehingga peran vital perguruan tinggi dituntut untuk lebih kreatif melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan banyak terobosan bagi kemajuan masyarakat di daerah (spirit Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Irwan, 2008).

Di era otonomi, baik otonomi daerah maupun otonomi pendidikan, di mana daerah dan dunia perguruan tinggi masing-masing diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis pada kajian kebutuhan strategis bagi pengembangan kemajuan pendidikan dan daerah, sehingga *output* yang dihasilkan betul-betul mutu yang lahir dari inovasi ide-ide kebaruan untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan daya saing daerah serta menjawab persoalan yang dihadapi sebagai tantangan pembangunan di masa kini dan masa depan. Di banyak negara dan daerah tak bisa disangkal bahwa berbagai kemajuan dihasilkan, dan prestasi di torehkan tidak terlepas dari kemitraan strategis antara dunia pendidikan tinggi dan dunia birokrasi dengan masing-masing mengandalkan keunggulan dimiliki seperti kekuatan mesin birokrasi yang disupport dengan dana dan infrastruktur serta dunia kampus didukung dengan kekuatan sumber daya manusia, riset dan laboratorium yang memadai (Nulhaqim dkk, 2016).

Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Tinggi

Salah satu diantara fungsi pokok pendidikan adalah menjadikan manusia Indonesia memiliki kemampuan andal yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Manusia yang cerdas saja tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Manusia yang cerdas yang di dalam jiwanya kosong dari ruh agama berupa iman dan takwa hanya akan melahirkan manusia yang timpang. Oleh karena itu, memacu kecerdasan dan keimanan serta ketakwaan adalah tugas pendidikan di era yang akan datang (Nasir dkk, 2004:35)



Menurut Noeng Muhajir pengembangan Sumber daya manusia (SDM) dikenal melalui dua konsep pendekatan yaitu pendekatan instrumental dan substansial. Pendekatan instrumental lebih fokus pada penguasaan metodologisnya, sedangkan pendekatan substansial lebih terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat dalam hal ekonomi, kesehatan, ketahanan mental, sosial budaya. Pendekatan pertama bersifat holistik atau menyeluruh sedangkan yang kedua lebih pada penguasaan bagian-bagian atau sub sistem dari pengembangan SDM secara menyeluruh. Pengembangan SDM pada dasarnya adalah sebuah investasi atau *human investment*. Pemikiran seperti ini, tentu berdasar atas kenyataan bahwa di dalam kerangka pembangunan masyarakat-bangsa, maka persoalan mendasarnya adalah bagaimana sebuah negara bangsa tersebut memiliki investasi manusia yang memadai, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan memerlukan dana pembangunan atau *capital investment*. Secara konseptual, modal pembangunan terdiri dari dua hal penting, yaitu modal manusia atau *human investment* dan modal uang atau *capital investment*. Keduanya tidak bisa dipisahkan itulah sebabnya, jumlah penduduk besar seperti Indonesia, sesungguhnya adalah modal manusia pembangunan yang sangat kuat, akan tetapi harus diikuti dengan kemampuan yang memadai. Jika tidak, maka besarnya penduduk bukan dalam arti positif-produktif akan tetapi negatif nonproduktif. Dahulu, ketika zamannya masih tradisional-konvensional, jumlah penduduk yang besar justru menjadi beban dalam pembangunan (Nasir dkk, 2004:41).

Di tengah kompetisi merebut pasar kerja yang semakin terbuka, selektif dan kompetitif, di mana dunia kerja dalam merekrut angkata kerja selalu memprioritaskan tenaga kerja terampil, memiliki *skill* dan pengalaman kerja yang didukung keterampilan dan kompetensi profesional, lalu pertanyaan bagaimana peningkatan SDM melalui pendidikan tinggi, karena tantangan kedepan luar biasa besarnya. Di tengah persaingan global semakin terbuka, ini menjadi tantangan besar bagi perguruan tinggi baik pengelola, mahasiswa dan pengguna lulusan pada umumnya

Peraan Perguruan Tinggi

Salah satu institusi yang dianggap memiliki peran penting dalam pengembangan SDM tentunya adalah perguruan tinggi. Anggapan ini tidaklah salah sebab lembaga pendidikan tinggi merupakan tempat bagi persemaian wawasan, sikap dan tindakan yang relevan dengan bakat, kemampuan dan sekaligus juga tantangan, peluang, dan hambatan di dalam mengarungi kehidupan yang lebih luas. Pendidikan tinggi adalah jendela untuk menatap kehidupan yang luas dan kompleks. Begitu kompleksnya, sehingga banyak stereotip yang diberikan kepada alumni institusi pendidikan tinggi, seperti tidak siap memasuki dunia kerja, kalah bersaing, tidak profesional dan sebagainya. Labelisasi seperti tentunya muncul dari kenyataan bahwa banyak alumni pendidikan memang menemui kendala lapangan ketika harus memasuki dunia pasar kerja. Itulah sebabnya, di sana sini banyak gagasan mengenai perubahan kurikulum mulai konsep *Link and Match*, *Competency base*, dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu sekurang-kurangnya diniati agar kesenjangan antara dunia pekerjaan dengan alumni pendidikan tinggi tidak semakin menganga dan jauh. Hasilnya, tentu waktu dan ruang yang akan mengujinya (Nasir, dkk. 2004:41).

Pendidikan tinggi hakekatnya didirikan untuk menjawab tantangan mengenai pentingnya sarjana yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidang atau profesinya. Dalam hal ini, maka terdapat pembedaan ilmu sesuai dengan



nomenklatur nya masing-masing. Secara umum dikenal, pembidangan ilmu-ilmu alam, ilmu sosial atau humaniora. Dalam konsep lain, disebut sebagai perguruan tinggi berbasis teknikal-operasional dan konseptual-teoritik. Atau juga disebut sebagai institusi yang memproduksi sarjana hard science dalam tataran ilmu yang aplikatif-implimentatif dan sarjana *soft science* dalam tataran ilmu yang konseptual-implimentatif (Nasir dkk, 2004:43;).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library reseach* yaitu melakukan studi berbagai literatur berupa buku, jurnal, koran, dan artikel yang membahas tentang peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing dan percepatan pembangunan daerah di era otonomi. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu melalui studi literatur, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu menyajikan data-data faktual dikemudian dinarasika secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Terguruan Tinggi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah

Keberadaan perguruan tinggi sangat dibutuhkan sebagai tempat untuk menumbuhkan segala kreatifitas, meningkatkan kompetensi pengetahuan dan melatih kemampuan akademik dan kemampuan sosial agar mahasiswa memiliki *hardskill* dan *softskill* sebagai bekal memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial yang serba serbi tantangannya sehingga diperlukan *lifeskill* yang mumpuni agar mampu bertahan dan bersaing dengan ketatnya kompetisi yang mengutamakan kompetensi di mana kompetensi menjadi jurus selamat yang memberikan tuah bagi generasi milenea yang mengutamakan menguasai IPTEKS, dan memiliki karakter yang khas seperti mental yang tangguh, disiplin, kerja keras, mandiri, pantang menyerah, bersikap ramah, sopan santun, toleransi dan anti kekerasan.

Menurut R.Eko Indrajit dan R. Djokopranoto, (2006:36) ada sekurang-kurang 4 (empat) atau 5 (lima) dimensi makna yang melekat pada perguruan tinggi , yaitu (1) dimensi keilmuan (ilmu dan teknologi), (2) dimensi pendidikan (pendidikan tinggi), (3) dimensi sosial (kehidupan bermasyarakat), dan (4) dimensi korporasi (satuan pendidikan atau penyelenggara). Dari 4 dimensi makna tersebut di atas apabila pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan martabat manusia, maka dapat diangkat ke dalam dimensi makna yang lebih mendalam, yaitu (5) dimensi etis.

Perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan tinggi harus dilakukan secara terencana, terukur dan sistematis dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat agar pendidikan tinggi kedepan bisa memenuhi harapan masyarakat, sehingga pendidikan tinggi mampu mencetak mahasiswa siap pakai dan berperan sebagai *problem solver* yang disertai dengan kompetensi yang terlatih dan mempunyai moralitas yang tinggi supaya dapat bekerja dengan disiplin tinggi, loyal, jujur, berdedikasi, bekerja keras, berjiwa sosial, adil, dan bertanggung jawab pada pekerjaan serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial

Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing daerah akan semakin terbuka dan saling menguntungkan apabila perguruan tinggi dan pemerintah daerah saling membuka diri membangun kerjasama kemitraan di banyak hal dalam rangka



membantu menyelesaikan persoalan strategis yang hari ini masih menjadi atensi publik misalnya pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi topik utama pembahasan (Nulhaqim dkk, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Tujuan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan atau menyebarluaskan luas ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (Indrajit & Djokoprapnoto, 2006:3-4).

Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang telah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi institut, atau universitas, (Indrajit & Djokoprapnoto, 2006: 4). Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang strategis dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat di daerah. Dengan sejumlah keunggulan yang dimiliki seperti sumber daya manusia yang dimiliki, perangkat lembaga yang mapan, serta kemampuan membuat riset dan kajian, maka perguruan tinggi seyogyanya harus berperan sebagai agen pembanguna (*agent of development*). Dengan potensi sumber daya manusia yang berkualitas yang memadai itulah, sudah sewajarnya bila Universitas atau perguruan tinggi di daerah harus mampu mengambil peran dalam pembangunan bukan hanya skala regional melainkan juga skala nasional. Bahkan perguruan di daerah ini dapat berkembang menjadi salah satu pusat keunggulan (*center of excellence*), jika ada upaya sungguh kearah itu (Syukronaby.Blogspot.com Rabu, 22 Februari 2012).

Dalam Konteks pembangunan di daerah, beberapa hal harus diperankan oleh perguruan tinggi, antara lain sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia daerah yang berkualitas dengan selalu meningkatkan dan memperkuat basis pendidikan masyarakat. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas ini mempunyai makna sangat strategis bagi pembangunan jangka panjang. Pandangan pembangunan dewasa ini menunjukkan SDM sebagai variable utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.
2. Mengadakan studi-studi kebijakan untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan kebutuhan di daerah. Juga membuat studi-studi evaluatif dalam upaya perbaikan program pembangunan di daerah dan peningkatan efisiensi dan efektifitas program.
3. Mengembangkan model-model pembangunan dengan mempertimbangkan sector-sector unggulan yang dapat diangkat dan dimanfaatkan oleh pemerintah



daerah dan masyarakat. Model-model pembangunan tersebut diperlukan terutama untuk merumuskan program yang relevan dengan kondisi lokal dan masyarakat setempat

4. Membangun kerjasama antara universitas, pemerintah daerah dan masyarakat lain untuk (1) menyusun kebijakan dan program RPJMD, (2) melaksanakan studi spesifik sehubungan dengan usaha mengembangkan ekonomi masyarakat lemah (3) melakukan kajian-kajian program nasional yang akan diterapkan di daerah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di samping pembangunan daerah sendiri.
5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pemihakan terutama kepada penduduk miskin, pengabdian kepada masyarakat tersebut, dilakukan dengan cara membuat program kegiatan yang bisa mengembangkan ekonomi rakyat, ini amat penting karena masyarakat di daerah, secara social ekonomi masih tergolong lemah. Program tersebut akan semakin mantap lagi bila didukung oleh kajian yang menelaah mengenai masalah-masalah social ekonomi masyarakat.
6. Membantu mengerahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan antara lain melalui lembaga swadaya dan kelompok-kelompok swadaya yang dimotivasi dan diprakarsai oleh perguruan tinggi (Syukronaby.Blogspot.com Rabu, 22 Februari 2012)

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Upaya Percepatan Pembangunan Daerah

Kiprah perguruan tinggi atau masyarakat kampus memiliki sejarah harum di tengah kehidupan negara bangsa. Di mulai dengan perannya di era pra kemerdekaan, dan masa kemerdekaan ditandai dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat hingga dewasa ini, kiranya peran perguruan tinggi sangatlah besar. Itulah yang menyebabkan beberapa slogan diterapkan padanya, missal kampus sebagai agen pembaharuan atau sebagai dinamisator dan katalisator perubahan. Kampus yang dimaksud adalah dinamika mahasiswa dan dosennya, terutama di negara berkembang, Di Amerika latin, kampus telah melahirkan sejumlah ilmuwan yang memiliki konsen terhadap pembaharuan masyarakat, demikian di Asia juga telah melahirkan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan perubahan sosialnya (Nasir dkk, 2004:79; Ruhana, 2012).

Peran perguruan tinggi di era otonomi daerah menurut Nasir dkk (2004: 80) sekurang-kurangnya dapat ditipologikan menjadi tiga hal, pertama, peran sebagai *social control*, perguruan tinggi hakekatnya memiliki kemampuan untuk melakukan peran control terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga sosial ekonomi politik. Di bidang politik, misalnya perguruan tinggi dapat memberikan masukan di dalam kerangka penyusunan kebijakan public melalui mekanisme aturan yang berlaku. Kebijakan sosial ekonomi politik yang tidak menguntungkan masyarakat dapat discounter sedemikian rupa melalui ruang-ruang publik yang tersedia atau diciptakan. Perguruan tinggi dapat berperan dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Di tengah otonomi daerah, di mana kekuasaan daerah sangat besar juga menyimpan kemungkinan penyalahgunaan yang lebih besar di daerah, maka solusi yang dapat ditawarkan sebagai peran masyarakat kampus ialah mengontrol secara ketat terhadap



berbagai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sehingga peenyelewenan dapat diminimalisasikan.

Kedua, peran *sosial engineering* atau rekayasa sosial. Di tengah otonomi daerah maka aspek yang sangat diutamakan ialah pemanfaatan potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Di dalam kerangka ini, perguruan tinggi harus terlibat di dalam proses mengubah potensi tersembunyi menjadi aktual, Perubahan masyarakat tidak dapat dilakukan dari luar, sebab yang terjadi ialah perubahan yang semu. Untuk mengatasi ini, maka yang diharuskan ialah perubahan dari dalam atau pelibatan atau konsernitas. Di sini yang dibutuhkan ialah aksi nyata di tengah realitas kehidupan yang rill. Konsep-konsep yang abstrak sebagaimana gaya berpikir masyarakat kampus perlu dioperasionalkan sehingga dapat didayagunakan untuk perubahan masyarakat menuju kesejahteraan. Tidak dimaksudkan agar orang tidak berpikir filosofis, akan tetapi hendaknya juga yang mampu menterjemahkan pemikiran filosofis tersebut menjadi lebih operasional. Jadi peran penganbdian lembaga perguruan tinggi sangat diharapkan di era otonomi daerah.

Di samping peran vital dan strategis perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan di daerah, menurut penulis kampus harus menjadi *problem solver* dalam menggerakkan berbagai kemajuan di daeraah melalui inonasi, terobosan dan memperkuat *networking* dengan berbagai stakeholders terutama dunia birokrasi (pemerintah daeraah), karena pemerintah daerah memiliki instrument kekuasaan yang cukup memadai untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial di berbagai bidang, kemampuan teknis dimiliki oleh birkorasi seperti ketersediaan tenaga-tenaga profesional yang terlatih dan terdidik menjadi modal utama untuk memnbangun kolaborasi kerjasama dengan peguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing daerah di era otonomi, oleh karena itu birokrasi harus menjadi mitra strategis perguruan tinggi dalam menyusun rencana umum kebijakan pembangunan daerah maupun dalam pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan perguruan harus dilibatkan secara aktif guna mengontrol pelaksanaan umum kebijakan pembangunan daerah di era otonomi, karena tanpa keterlibatan kampus dalam mensupport ide-ide kreatif sulit daerah bisa berkembang dan bersaing di era keterbukaan informasi dan digitalisasi ipteks yang mengharuskan pemerintah daerah bersikap adaptif, terbuka dengan berbagai kontestasi dan kompetisi baik bersikap lokal, regional, nasional dan global.

Sehingga di era otonomi pemerintah daerah diharapkan memiliki kekuasaan antara lain :pertama, *self regulating power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerahnya, kedua, *self modifying power* ialah kemampuan penyesuaian-penyesuain dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah, termasuk melakukan terobosan yang inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi wilayahnya, ketiga *local political support* ialah menyelenggarakan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutuf maupun DPRD sebagai unsur legislatif, dukungan politik lokal ini akan menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, keempat *financial resource*, ialah mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kebutuhan, kelima, *developing brain power*, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur



pemerintah dan masyarakat yang andal, yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai persoalan (Syamsudin, 2002; Amin, 2013; Muwaroh, 2019; Adam & Lanontji, 2021).

Peran pemerintah daerah di era otonomi hakekatnya ialah sebagai fasilitator dan administrator yang merupakan pelayan masyarakat, sebagai actor pelayan masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan yang belum teruji keahliannya melalui *public sphere* yang menjadi kata kunci bagi pelaksanaan berbagai kebijakan di tengah otonomi daerah. Ruang public ialah tempat di mana setiap kebijakan yang akan diambil selalu diperdebatkan baik melalui forum resmi semacam pertemuan, diskusi, seminar atau melalui peran surat kabar, majalah atau lainnya, di era otonomi daerah, setiap kebijakan seharusnya melalui ruang publik terlebih dahulu, sehingga hasil diperoleh akan efektif dan efisien (Aziz, 2016; Endah, 2016).

KESIMPULAN

Di era otonomi daerah peran perguruan tinggi harus diberikan ruang yang lebih besar untuk menggerakkan perubahan dan berbagai kemajuan sesuai dengan fungsinya sebagai *agen of change* karena perguruan tinggi memiliki semua kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kemajuan ilmu, teknologi, tak dapat disangkal bahwa perguruan tinggi adalah tempat persemaian ide-ide besar yang melahirkan banyak pemikir, ilmuwan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, dengan menjalin kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah maka dapat dipastikan daya saing meningkat lewat kolaborasi ide, dan inovasi yang diciptakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan mendukung baik materil dan moril dalam proses penulisan penelitian ini sampai proses publikasi artikel yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada Direktur STIKES Medica Farma Husada Dr. Syamsuriansyah Sadakah, M.Kes atas dukungannya disampaikan ucapan terimah, dan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Bima Dr. Syarifuddin, M.Pd telah banyak memberikan motivasi kepada para dosen Program Studi Pendidikan Matematika STKIP untuk terus meningkatkan publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., & Lanontji, M. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52-71.
- Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 39-46.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.



- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 797-804.
- Indrajit, R. E. & Djokopranoto, R. (2007). *Manajemen Pendidikan Tinggi: Pustaka Pelajar*
- Irwan, A. L. (2008). Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 89-98.
- Muwaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik Good Governance di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Media Birokrasi*, 142-156.
- Nasir, R. & Syam, N. (2004), *Institusi Sosial di Tengah Perubahan: Jengala Pustaka Utama*
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Asean community 2015 studi kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 197.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Ruhana, I. (2012). Pengembangan kualitas sumber daya manusia vs daya saing global. *PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1).
- Sari, N. M., & Retnaningsih, E. (2020). Strategi Pengembangan Science Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 3(1), 1-20.
- Sihite, M., & Saleh, A. (2019). Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi: tinjauan konseptual. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 29-44.
- Syukronaby. Blogspot.com Rabu, 22 Februari 2012)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional